

MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH DALAM PEMENUHAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN

Hasnida¹, Rini Astuti²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA Jakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

¹hasnidampd@gmail.com ✉, ²unirini96@gmail.com ✉



ABSTRAK

Penelitian untuk menganalisis dan memperoleh wawasan mengenai pengelolaan keuangan sekolah dalam memenuhi kebutuhan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Informan pimpinan sekolah, sekretaris, dan bendahara. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Analisis data: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah untuk memenuhi kebutuhan prasarana pendidikan meliputi perencanaan anggaran sekolah, pengalokasian anggaran, pencatatan keuangan, dan akuntabilitas keuangan. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan keuangan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam evaluasi, analisis, pemantauan, dan pemenuhan berbagai kebutuhan sekolah.

Kata Kunci: Keuangan, Manajemen, Infrastruktur, Sekolah

ABSTRACT

Research to analyze and gain insights into the financial management of Public Middle School 22 Sijunjung, West Sumatra, in meeting the educational infrastructure needs. A qualitative approach using phenomenology was employed. Informants included the school principal, secretary, and treasurer. Data collection involved interviews, participatory observation, and document analysis. Data analysis included data condensation, presentation, and conclusion drawing. This study shows that the financial management of the school to meet educational infrastructure needs encompasses school budgeting, budget allocation, financial recording, and financial accountability. This study highlights the importance of financial management in providing educational facilities and infrastructure by involving internal and external stakeholders in the evaluation, analysis, monitoring, and fulfilling various school needs.

Keywords: Finance, Management, Facilities, Infrastructure, School

Copyright © 2024 Hasnida; Rini Astuti

A. PENDAHULUAN

Manajemen keuangan pendidikan sangat memperhatikan pentingnya pengaturan dana dalam meningkatkan program sekolah, mendukung kinerja guru dalam proses belajar mengajar, dan mendukung pencapaian akademis para peserta didik (Burger, 2015). Sangat penting pengelolaan keuangan sekolah bagi terselenggaranya program sekolah (Sajono, 2018). Khususnya untuk manajemen, pimpinan sekolah harus mempunyai informasi tentang hal ini (Ranggono et.al, 2016). Semua kegiatan sekolah tidak lepas dari penggunaan sumber daya keuangan, pengelolaan yang baik diperlukan tidak peduli seberapa besarnya yang dihimpun dan dialokasikan oleh dinas terkait, sekolah akan mengalami kerugian dan kegagalan apabila keuangan sekolah tidak dikelola dengan manajemen yang baik (Myende et al., 2018).

Supaya lembaga pendidikan bisa memastikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, mengelola keuangan mesti ditekuni dengan sungguh-sungguh, secara sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan menyebutkan bahwa manajemen keuangan yang efisien sangat penting untuk meminimalkan risiko-risiko yang tidak diinginkan dan untuk memastikan keuntungan bagi lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu pilar utama dari sebuah lembaga pendidikan yang unggul (Kenayathulla, 2018). Dalam upaya menciptakan sekolah yang tepat guna serta hemat melalui manajemen anggaran, perlu juga perhatian pada sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut (Centerwall et al, 2019). “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 bahwa prinsip yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik diperlukan dalam pengelolaan dana pendidikan”.

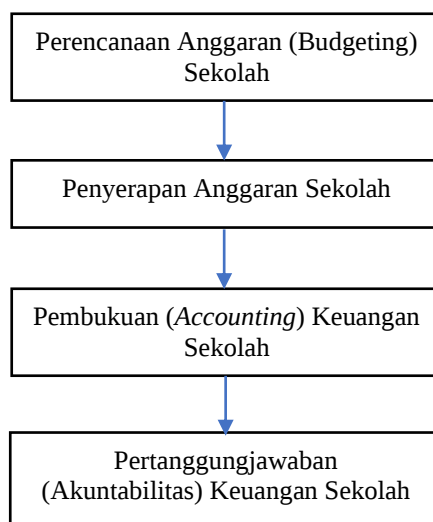
Sekolah negeri maupun swasta memiliki peraturan yang berhubungan dengan realisasi anggaran sekolah yang akan dimanfaatkan untuk mengelola pendidikan di sekolah tersebut. Di lapangan realitas yang terjadi adalah manajemen keuangan memainkan peran penting dalam mengatur tata kelola pemberian gaji pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga tata usaha, serta dalam meningkatkan fasilitas pendidikan. Untuk membantu mengatasi tantangan dalam pengelolaan operasional sekolah, pemerintah memberikan dukungan keuangan yang dikenal sebagai Bantuan Operasional Sekolah (Widyatmoko, 2017). BOS merupakan dana yang diberikan kepada satuan pendidikan di lembaga sekolah/madrasah dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan peserta didik, yang mencakup penyediaan sarana prasarana pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sekolah, serta biaya honor guru.

Guna mencapai tujuan pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar infrastruktur pendidikan harus memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Latifah, kegiatan pembelajaran sulit dapat terlaksana secara optimal apabila infrastrukturnya kurang memadai (Latifah, 2017). Untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, diperlukan pendekatan yang cerdas dengan penuh terobosan untuk memaksimalkan kesempatan. Sekolah dapat mencari dukungan dana dari berbagai sumber, termasuk wali murid, komite sekolah, dan pemerintah (Adillah, 2016). Sekolah perlu menerapkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan stakeholders, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, guna mengawasi sistem keuangan sekolah (Zahrudin, 2019). Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan sekolah, karena hal ini memiliki dampak signifikan terhadap motivasi pengajaran para guru (Tandililing, 2019).

Sumber daya pendidikan bisa berasal dari orang tua atau komunitas, mesti dikelola secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Anam menjelaskan tentang pengelolaan keuangan atas perolehan infrastruktur pendidikan mesti diatur secara cermat dan mencakup pengawasan ketat mulai dari tahap perencanaan hingga perolehan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penggunaan (Anam, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis praktek manajemen keuangan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan fokus pada pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Budaya terbuka, tingkat kedisiplinan yang tinggi dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh aspek kegiatan sekolah, khususnya pengelolaan bujet serta manajemen infrastruktur pendidikan merupakan keunikan dari penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang berfokus pada penggambaran atau pemaparan suatu fenomena atau peristiwa secara mendalam dan rinci berdasarkan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan. Peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumen. Data ini menggambarkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah. Peneliti menganalisis dan memahami pengelolaan bujet pendidikan yang diterapkan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Sumber informasi dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, wakil kepala, bendahara dan pemegang barang aset. Teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa metode. *Pertama* kondensasi data dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data berupa teori atau hasil penelitian orang lain tentang pengelolaan manajemen pendidikan. *Kedua* penyajian data dengan menampilkan data hasil reduksi dalam bentuk kalimat atau tabel atau gambar yang dapat mendeskripsikan hasil penelitian. *Ketiga* penarikan kesimpulan dengan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan reduksi dan penyajian data hingga peneliti mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan focus atau rumusan masalah dalam penelitian ini. Gambar berikut menjelaskan tentang desain penelitian Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan:



Gambar 1. Desain Penelitian

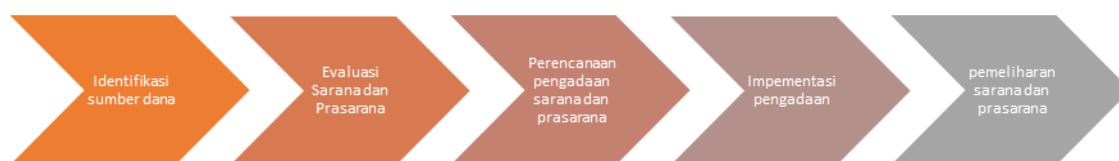
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitiann tentang manajemen keuangan sekolah dalam upaya pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang diterapkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat, peneliti menemukan data dilapangan yaitu:

1. Perencanaan Anggaran (*Budgeting*) Sekolah

Perencanaan anggaran (*budgeting*) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat adalah sebuah pernyataan yang mengestimasi pencapaian kinerja yang diharapkan selama periode waktu tertentu dan diungkapkan dalam bentuk nilai finansial. Proses perencanaan yang diatur dengan sistimatis merupakan seluruh aktivitas sekolah yang dinyatakan dalam satuan keuangan, dan berlaku untuk masa yang akan datang. Menurut Reni, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung Sumatera Barat, proses merencanakan bujet dalam pengadaan infrastruktur pendidikan dimulai dengan adanya rapat gabungan pimpinan sekolah, pendidik, orang tua siswa, stakeholder dan yayasan. Kebutuhan infrastruktur pendidikan direncanakan untuk waktu satu tahun tertentu merupakan fokus pertemuan. Dalam pertemuan ini, diambil kesepakatan mengenai beberapa hal, termasuk hasil penilaian kondisi infrastruktur saat ini, penyusunan rencana dan pertimbangan untuk mendahulukan sarana yang paling dibutuhkan (Reni, 2023).

Perencanaan anggaran akan diatur melalui dokumen yang dikenal sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), pendekatan yang umumnya digunakan di sekolah adalah dengan mengidentifikasi sumber-sumber dana yang akan masuk (Oktavia, 2023). Pendekatan ini membantu dalam mengevaluasi kondisi keuangan sekolah, menetapkan prioritas yang perlu dipenuhi, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana, jika terdapat kerusakan, akan dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan (Putra, 2023). Dalam menentukan alokasi anggaran, sangat penting untuk mempertimbangkan urgensi kebutuhan setiap kegiatan. Pertimbangan ini melibatkan aspek-aspek seperti waktu, personel yang terlibat, serta jumlah dana yang tersedia. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap sumber dana yang tersedia dan perkiraan jumlah dana yang dapat diperoleh oleh lembaga untuk setiap kegiatan yang direncanakan sangatlah diperlukan. Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, sering kali proses alokasi anggaran diimplementasikan melalui Rencana Kerja Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/RKAM), sesuai dengan penjelasan yang diberikan. RKAS/RKAM adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan sekolah, beserta alokasi anggaran yang diperlukan untuk setiap kegiatan tersebut, yang selanjutnya akan dijalankan sesuai prioritas dan urgensi kebutuhan sekola(Wandira, 2023). Berdasarkan dari hal tersebut, maka perencanaan keuangan sekolah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Perencanaan Keuangan Kekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasaran

Berdasarkan ambar 2, maka dapat dijelaskan bahwa: identifikasi sumber dana di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung dilakukan setiap akhir tahun, terutama pada bulan Oktober, melalui rapat yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, majelis guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Rapat ini bertujuan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sumber dana yang diidentifikasi antara lain adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, yang untuk tahun 2024 berjumlah Rp 148.500.000 untuk 136 siswa. Selain itu, ada juga bantuan dari komite, berupa sumbangan orang tua yang diterima dalam bentuk barang atau fasilitas, seperti kantin, lahan parkir, dan tenda untuk kegiatan. Sumber dana lainnya adalah hasil penjualan sawit dari lahan kosong yang dimiliki sekolah, di mana 40% digunakan untuk pemeliharaan sawit dan 60% untuk kebutuhan sekolah.

Selanjutnya, evaluasi infrastruktur pendidikan dilaksanakan dengan menghadirkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengelola barang, wali kelas, serta kepala laboratorium IPA dan TIK. Mereka menginventarisasi barang dan fasilitas yang ada, serta memeriksa kondisi fisik fasilitas untuk menentukan apakah masih layak pakai atau memerlukan perbaikan, seperti memastikan kekokohan bangunan dan fungsi peralatan elektronik. Setelah evaluasi, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan melalui rapat awal tahun yang dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, majelis guru, dan komite sekolah. Dalam rapat ini, hasil evaluasi dibahas untuk menentukan prioritas pengadaan berdasarkan kondisi terkini. Keputusan diambil untuk mengadakan buku kurikulum merdeka, perbaikan meja dan kursi laboratorium IPA, pembelian laptop untuk bendahara BOS, serta printer sekolah yang rusak.

Pada tahap implementasi, kepala sekolah, bendahara BOS, dan pengelola barang mulai mencari vendor untuk pengadaan barang dan jasa. Pemilihan vendor dilakukan berdasarkan kualitas, harga, dan kemampuan memenuhi spesifikasi teknis. Mengingat peraturan baru di Kabupaten Sijunjung, pengadaan harus melalui aplikasi SIPlah. Setelah menemukan vendor di SIPlah, kontrak dilakukan, diikuti dengan pemeriksaan barang dan pembayaran oleh bendahara BOS yang juga menyiapkan laporan seperti faktur dan bukti serah terima barang. Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, tanggung jawab dibagikan antara wali kelas untuk kelas, kepala pustaka untuk perpustakaan, kepala laboratorium untuk laboratorium IPA dan TIK, serta pemegang barang dan penjaga sekolah untuk sarana dan prasarana secara keseluruhan. Pemeliharaan juga melibatkan pihak lain, seperti PLN untuk jaringan listrik yang diperiksa setiap tiga bulan dan ahli komputer untuk kelayakan perangkat yang dilakukan minimal setiap enam bulan. Selain itu, pemeliharaan alat elektronik seperti AC, sound system, dan dispenser dilakukan oleh guru yang memiliki pengetahuan tentang elektronik.

2. Penyerapan Anggaran Sekolah

Penjelasan yang diberikan di atas menggambarkan bahwa penyerapan anggaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat, telah berjalan dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wandira ditemukan bahwa sekolah ini telah mematuhi perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam RAPBS dan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku di lembaga pendidikan. Artinya, segala pengeluaran anggaran memerlukan persetujuan dari pimpinan sekolah, terutama jika berhubungan

dengan sarana dan prasarana, dan mesti berkoordinasi dengan pengelola sarana prasarana (Wandira, 2023). Pendekatan ini mencerminkan transparansi, pertanggungjawaban, dan tatakelola keuangan yang baik dalam penggunaan anggaran sekolah, yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat (Oktavia, 2023).

Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di sekolah tersebut dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Beberapa indikator yang mendukung kesimpulan adalah, *pertama*, pengajuan anggaran: Unit-unit di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat mengajukan anggaran untuk sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa rencana pengeluaran telah dipertimbangkan dengan baik. *Kedua* disposisi kepala sekolah: adanya disposisi atau persetujuan dari kepala sekolah mengindikasikan bahwa setiap pengeluaran telah mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari pihak berwenang dalam sekolah. *Ketiga* data serta *financial reporting*:: setelah pengadaan infrastruktur pendidikan, menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut diikuti dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai. Ini penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dibuktikan dengan laporan keuangan.

Dengan demikian, keseluruhan proses penyerapan anggaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat tampaknya berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian anggaran yang baik. Hal ini penting dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan sekolah digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pendidikan (Putra, 2023) menjelaskan tentang keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan adalah dasar pengelolaan keuangan yang diterapkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat. Hal ini telah menjadi aturan yang berlaku dalam lembaga tersebut selama waktu yang cukup panjang. Malahan beberapa tahun lalu tim mengembangkan petunjuk teknis untuk penyajian, penyampaian, dan penyusunan laporan keuangan.

Sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik warga sekolah maupun masyarakat tentang dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan rencana yang disampaikan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan prasarana pendidikan, hal ini menunjukkan komitmen sekolah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk memastikan penggunaan dana pendidikan yang tepat dan bermanfaat. Kemampuan satuan kerja untuk mengalokasikan anggaran tertentu yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien guna mencapai output yang telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Fajar et al, 2017). Proses penyerapan anggaran mengharuskan setiap pengeluaran untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, dan tindakan ini harus dilakukan secara efisien dinamakan penyerapan anggaran (Rahmadani et al, 2017). Dokumentasi setiap pengeluaran mesti dilakukan dengan benar, dan bendahara bertanggung jawab untuk menjaga pembukuan sesuai dengan rencana pengeluaran anggaran.

Keberhasilan dalam mencapai target penyerapan anggaran di lembaga pendidikan sangat penting, karena kegagalan dalam pencapaian target ini akan mengakibatkan sia-sia dalam pengeluaran, karena tidak semua dana yang dialokasikan bisa digunakan oleh sekolah, sebab mengindikasikan bahwa bujet yang ada menjadi tidak produktif, Intern tidak

dimanfaatkan dengan optimal (Ruhmaini, 2019). Keterbatasan sumber daya finansial pada sekolah bisa seefektif mungkin dapat mendukung pelaksanaan program strategis jika pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien. Realisasi anggaran mesti menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi pemangku kepentingan, terutama dalam hal ini yang bertanggung jawab secara teknis yaitu bendahara sekolah. Seorang bendahara sekolah memiliki otoritas dalam hal penyimpanan dan pengeluaran biaya serta dokumen-dokumen terkait bujet, dan ia wajib untuk menghitung dan bertanggungjawab (Widyatmoko, 2017). Dalam konteks manajemen keuangan pendidikan, terdapat berbagai pendekatan konseptual yang dapat digunakan, namun terdapat karakteristik khusus dalam pengelolaan keuangan di madrasah/sekolah.

Masyhud menekankan beberapa point penting yang mesti menjadi perhatian bendahara sekolah dalam pengelolaan anggaran pendidikan, antara lain: *Pertama*, bendahara harus menyusun laporan laporan sekolah dan mengirimkannya kepada kepala sekolah untuk memeriksa RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) saat tutup akhir tahun. *Kedua*, anggaran sekolah yang dikeluarkan harus didukung oleh data berupa pembelian atau bukti bayar pajak jika berlaku. *Ketiga*, penerima honorarium atau tanda bukti lain yang sah terkait bantuan harus mencantumkan tanda tangan. *Keempat*, komite sekolah yang bertanggung jawab atas akuntabilitas keuangan sekolah dapat memeriksa bukti-bukti pengeluaran anggaran sekolah (Masyhud, 2013).

3. Pembukuan (*Accounting*) Keuangan Sekolah

Proses penting yang dilaksanakan bendahara dengan teratur adalah pembukuan keuangan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat. Proses ini bertujuan untuk pengumpulan bukti dan laporan keuangan dengan cakupan mencatat aliran dana, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Wandira, kegiatan pembukuan keuangan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat, berjalan dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa yang bertanggungjawab dengan keuangan sudah menuanai fungsi dan perannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Proses ini meliputi tahap penerimaan permohonan hingga pemberian pesanan oleh klien, pencairan dana, dan pelaporan keuangan. Akuntansi keuangan terkait pengembangan sarana dan prasarana sekolah juga berjalan dengan baik (Wandira, 2023).

Pernyataan dari Reni dan Putra membahas pentingnya administrasi keuangan dan pengelolaan sarana prasarana dalam konteks kegiatan belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan (Reni, 2023) dan (Putra, 2023). Berikut ini adalah poin-poin kunci yang dapat disimpulkan dari kedua pernyataan tersebut: semua perlengkapan kegiatan belajar mengajar yang dibeli mesti dicatat dan disimpan secara baik dalam buku kas milik sekolah, termasuk sarana penunjang dan barang-barang lainnya. Reni menekankan pentingnya pembuatan laporan keuangan yang akurat dan terperinci oleh bendahara sekolah, yang harus disetujui oleh kepala sekolah sebelum digunakan sebagai acuan penilaian keuangan bersama dengan yayasan, kepala sekolah, dan otoritas sekolah. Selain itu, sebagai penunjang hasil belajar peserta didik, sarana prasarana pendidikan sangatlah penting, pengadaan sarana ini menggunakan dana anggaran sekolah dan setiap pembelian mesti didukung oleh nota serta laporan kepada pihak lembaga. Kedua pernyataan ini menekankan perlunya administrasi

keuangan yang tertib, termasuk pencatatan dan pelaporan pembelian barang serta pengadaan sarana prasarana, yang membantu dalam pemeliharaan, pengawasan, dan perencanaan pengadaan barang sesuai kebutuhan masa depan. Administrasi keuangan yang baik dan pemeliharaan catatan yang rapi juga memberikan penjelasan yang diperlukan untuk merencanakan akuisisi dan pemeliharaan aset berdasarkan kebutuhan fasilitas dimasa depan.

Lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka dan memastikan bahwa peserta didik memiliki lingkungan belajar yang memadai untuk mencapai hasil belajar yang baik dengan menjaga administrasi keuangan dan pengelolaan sarana prasarana secara tertib dan transparan. Pernyataan tentang pentingnya pembukuan keuangan dalam pengelolaan sekolah, terutama dalam konteks pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan dan perlengkapan sekolah (Komariah, 2018).

4. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) Keuangan Sekolah

Pertanggungjawaban bujet di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai komitmen yang diemban oleh individu untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka lakukan, terutama yang berhubungan dengan aspek keuangan, kepada pihak yang memberikan otorisasi atau wewenang. Dalam kerangka rencana yang telah ditetapkan oleh sekolah, pihak sekolah bertanggung jawab untuk menggunakan dana dengan penuh kebijakan, yang diperuntukkan bagi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan hasil pengeluaran ini akan dilaporkan kepada kepala sekolah, yayasan, orang tua siswa, stakeholder, dan dinas pendidikan. Pertanggungjawaban keuangan sekolah dalam rangka pemenuhan infrastruktur sekolah direkam dalam berbagai dokumen, termasuk buku kas harian yang dikelola oleh bendahara sekolah, serta buku kontrol keuangan yang disampaikan kepada kepala sekolah dan para pemangku kepentingan pada pertemuan setiap bulan, tiga bulan, dan diakhir tahun pembelajaran (Putra, 2023).

Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Sijunjung, Sumatera Barat melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada akhir tahun pelajaran, dengan melibatkan orang tua siswa dalam proses tersebut. Di akhir tahun sekolah, pihak sekolah membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) terkait infrastruktur pendidikan bersama komite sekolah, yayasan, dan pihak sekolah untuk memastikan bahwa yang dipertanggungjawabkan tersebut sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun (Oktavia, 2023). Pada skala kecil tertanggungjawaban keuangan sekolah biasanya dilakukan oleh bendahara dengan menginformasikan laporan keuangan pada pimpinan sekolah. Sementara itu, dalam skala besar pada kasus pertanggungjawaban, penyampaian laporan keuangan setiap akhir tahun pada rapat sekolah dengan mengundang orang tua dalam proses evaluasi dan penyampaian laporan tersebut.

Komponen integral yang tak dapat dipisahkan dari aspek-aspek lainnya adalah

keuangan sekolah (Reni, 2023). Kondisi keuangan yang baik di lembaga pendidikan ini memiliki dampak positif terhadap kemampuan sekolah dalam mendukung berbagai kebutuhan, terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses belajar-mengajar, serta untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebaliknya, ketika sekolah kekurangan sumber daya keuangan, hal ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai dengan perencanaan. Dengan premis tersebut, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memberikan informasi, penjelasan, dan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Fattah, 2016). Akuntabilitas mencerminkan evaluasi oleh pihak lain terhadap kualitas performa individu dalam menyelesaikan tugas yang merupakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam mencapai tujuan akuntabilitas dapat dilihat sebagai alat pengendalian tindakan (Mubin, 2018).

Pertanggungjawaban mengenai pendapatan serta pemanfaatan bujet pada sekolah biasanya diwujudkan dalam bentuk pelaporan setiap bulan serta triwulanan, yang disampaikan untuk pihak-pihak seperti: a) kepala dinas pendidikan, b) kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), c) dinas pendidikan di tingkat kecamatan, dan pihak-pihak terkait (Komariah, 2018). Mempertanggungjawabkan anggaran sekolah, sebagai bagian dari pelaporan keuangan, adalah tugas bendahara dan staf keuangan sekolah. Pelaporan keuangan ini mencakup informasi tentang uang masuk, uang keluar serta penggunaan dana. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mengacu pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sekolah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Molchanova, 2019). Terdapat tiga pilar utama yang menjadi prasyarat bagi terciptanya akuntabilitas, yaitu: transparansi, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, dan adanya partisipasi (Huriyah, 2014).

Melalui praktik akuntabilitas keuangan di lingkungan sekolah, masyarakat akan cenderung meningkatkan kepercayaannya terhadap sekolah (Tandililing, 2019). Manajemen sekolah yang diterapkan secara efektif dapat menghasilkan manfaat positif pada keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sekolah (Radzi, 2010). Pertanggungjawaban juga bertujuan agar mengevaluasi performa akademik serta memahami kebanggaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendidikan termasuk partisipasi stakeholder pada proses pemantauan layanan pendidikan.

D. SIMPULAN

Sekolah memerlukan manajemen keuangan yang baik untuk mengelola sekolah serta memelihara infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, peran kepemimpinan kepala sekolah mesti mampu memahami konteks sekolah sebagai lembaga pendidikan dan mengelola kedua aspek tersebut secara tepat. Melalui sumber daya dan infrastruktur pendidikan yang tepat, sekolah bisa menyokong aktivitas belajar mengajar supaya tujuan pendidikan dapat tercapai secara tepat dan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam pengelolaan keuangan, sekolah harus menciptakan layanan yang berkualitas dan menjaga manajemen terbuka yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi sebagai badan pengelola sehingga semua pihak yang terlibat dalam pendidikan merasa puas. Sehubungan infrastruktur pendidikan, perlu diperhatikan tentang pentingnya memelihara infrastruktur yang ada. Jika sistem pengelolaan aset dan infrastruktur tidak ditangani dengan serius, pemeliharaan menjadi tugas yang sangat sulit. Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien memerlukan pengelolaan khusus terhadap fasilitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, G. (2016). Manajemen Keuangan Sekolah. *Manajer Pendidikan*, 10(4), 343–346.
- Anam, K. (2019). Manajemen Keuangan Madrasah yang Bersumber dari Masyarakat. *At-Turats*, 13(1), 56–75.
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Padjadjaran: Widya Padjadjaran.
- Burger, R. H., Kaufman, P. T., & Atkinson, A. L. (2015). Disturbingly Weak: The Current State of Financial Management Education in Library and Information Science Curricula. *Journal of Education for Library and Information Science*, 56(3), 13–16.
- Centerwall, U., & Nolin, J. (2019). *Using an Infrastructure Perspective to Conceptualise The Visibility of School Libraries in Sweden*. *Information Research*, 24(3), 1–30.
- Fajar, N., & Arfan, M. (2017). Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 10(2), 95–102.
- Fattah, Nanang. (2016). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huriyah, Lilik. (2014). *Manajemen Keuangan: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya: UINSA Pers
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. *Jurnal AlAfkar*, 6(1), 67–93.
- Latifah, Purwanti, E., & Kusuma, N. (2017). Peran Manajemen Keuangan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di MTs Negeri 2 Pringsewu Kecamatan Banyumas. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 9–14.

- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal Ansiru PAI*, 1(2), 119–145.
- Masyhud, S. (2013). *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Molchanova, V. S., & Federation, R. (2019). Education and Financial Inclusion. An Empirical Study in Students of Higher Education. *European Journal of Contemporary Education*, 8(4), 810–818.
- Mubin, N. (2018). Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah. *At-Taqwa*, 14(2), 80–92.
- Myende, P. E., Samuel, M. A., & Pillay, A. (2018). Novice Rural Principals Successful Leadership Practices in Financial Management: Multiple Accountabilities. *South African Journal of Education*, 38(2), 1–11.
- Oktavia, Yersi. (2023). *Interview*. Sijunjung, Sijunjung, Sumatera Barat.
- Prakoso, M. D., & Herlawati. (2017). Sistem Informasi Pembayaran Biaya Pendidikan Siswa pada SMK Perwira Bekasi Utara. *Bina Insani ICT Journal*, 4(1), 95–110.
- Putra, Arisman Nanda. (2023). *Interview*. Sijunjung, Sijunjung, Sumatera Barat.
- Radzi, N. M., Ghani, M. F. A., Siraj, S., & Afshari, M. (2010). Financial Decentralization in Malaysian Schools : Strategies for Effective Implementation. *The Malaysian Online Journal of Educational Science*, 1(3), 20–32.
- Rahmadani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 134–148.
- Rangongo, P., Mohlakwana, M., & Beckmann, J. (2016). Causes of Financial Mismanagement in South African Public Schools : The Views of Role Players. *South African Journal of Education*, 36(3), 1–10.
- Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. (2019). Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 31–43.
- Said, A. (2018). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Melestarikan Budaya Mutu Sekolah. Evaluasi*, 2(1), 257–273.
- Sanisah, Siti. (2015). Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol.*, 3(1), 101–118.
- Suhartini, H. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah terhadap Manajemen Sekolah dalam Mewujudkan Efektifitas Penggunaan Anggaran Dana Sekolah. *Khazanah Akademia*, 1(1), 71–81.
- Tandililing, J. (2019). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah terhadap Motivasi Mengajar Guru di Kabupaten Keerom. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4(2), 38–57.
- Wandira, Ayu. (2023). *Interview*. Sijunjung, Sijunjung, Sumatera Barat.
- Widyatmoko, Subkhi, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemas

I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(1), 153-160.

Zahrudin, Arifin, Z., & Suhandi, A. (2019). *Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah*. *Jurnal Administarsi Pendidikan*, 26(1), 45–5

